

## KONSTRUK FISHING GROUND: KONFLIK ANTAR NELAYAN KABUPATEN LAMONGAN DAN GRESIK TAHUN 1999-2004

**Nur Hidayati Al Maghfiroh**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

Email: nural-maghfiroh16040284067@mhs.unesaa.ac.id

**Eko Satria Hermawan**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Nelayan merupakan mata pencarian penduduk yang memiliki tempat tinggal di pesisir pantai, nelayan biasanya melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan alat tangkap dan kapal tangkap yang sangat beragam. Selain menggunakan alat tangkap dan kapal tangkap yang sangat beragam, para nelayan juga melakukan penangkapan ikan di laut bebas yang tidak memiliki batas wilayah secara pasti dan tertulis. Hal tersebut yang sering kali menimbulkan konflik antar nelayan di laut. Karena besarnya persaingan di laut oleh para nelayan yang sangat banyak sehingga konflik tidak dapat dihindari. Konflik dikalangan nelayan dapat terjadi antara nelayan lokal daerah dengan nelayan lokal daerah, hingga konflik nelayan antar daerah. Konflik antar nelayan yang terjadi diatasi dengan berbagai cara dan dengan beberapa pihak terkait termasuk instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Berdasarkan analisa sumber yang dilakukan, terdapat konflik yang terjadi antara nelayan Kabupaten Lamongan dengan nelayan Kabupaten Gresik yang merupakan konflik kelas. Konflik antar nelayan yang terjadi berkaitan dengan letak *fishing ground* antar nelayan yang berdekatan dan kondisi *fishing ground* antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik yang berbeda dan memiliki keunggulan masing-masing. Yang kedua yakni penyelesaian konflik yang dilakukan secara kekeluargaan oleh nelayan terkait dan melibatkan pemerintah apabila konflik yang terjadi sudah berupa konflik besar dan bersinggungan secara fisik dan terjadi kerusuhan massa yang mengharuskan aparat pemerintah untuk meleraikan dan menyelesaikan masalah tersebut. Ketika masalah antar nelayan yang terjadi dirasa masih bisa diatasi oleh kelompok nelayan maka pihak pemerintah tidak akan dilibatkan.

**Kata Kunci:** Konflik, Fishing Ground, Nelayan

### Abstract

*Fishermen are the livelihood of residents who have a place to live on the coast, fishermen usually do fishing at sea using fishing gear and fishing boats that are very diverse. In addition to using fishing gear and fishing boats that are very diverse, fishermen also conduct fishing in the open sea that does not have definite and written boundaries. This often causes conflicts between fishermen at sea. Because the amount of competition at sea by the fishermen is very much so that conflict can not be avoided. Conflicts between fishermen can occur between local local fishermen and local local fishermen, to fishermen conflicts between regions. Conflicts between fishermen that occur are overcome in various ways and with several related parties including government agencies. This study uses historical research methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography*

*Based on the analysis of the source, there is a conflict between the fishermen in Lamongan Regency and the fishermen in Gresik Regency which is a class conflict. Conflicts between fishermen that occur are related to the location of fishing ground between adjacent fishermen and the condition of fishing ground between the regencies of Lamongan and Gresik districts which have their respective advantages. The second is the settlement of conflicts carried out in a friendly manner by the fishermen involved and involving the government if the conflict has occurred in the form of a major conflict and physical contact and a mass riot that requires government officials to intervene and resolve the problem. When inter-fishery problems that occur are still considered to be overcome by fishing groups, the government will not be involved.*

**Keywords:** Conflict, Fishing Ground, Fishermen

## PEDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim dengan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Wilayah lautan yang dimiliki Indonesia terdiri dari beberapa perairan diantaranya yakni Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Flores, dan Laut Banda dimana setiap perairannya memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Salah satu wilayah pantai Laut Jawa yakni wilayah Kabupaten Lamongan dan Gresik yang memiliki potensi besar dalam sektor kelautan mulai dari hasil tangkap ikan, biota laut, dan pariwisata. Desa pesisir di kedua kabupaten sebagian besar memiliki profesi sebagai nelayan dan petani tambak. Para nelayan laut dalam kegiatan mencari ikan menggunakan kapal tangkap dan alat tangkap yang beragam. Diantaranya yakni rawai, payang, *gill net* atau jaring ingsang, bubu, *purse seine* atau pukut cincin, *tramel net* atau jaring udang, dan juga dogol. Hasil tangkapan nelayan selain dipengaruhi oleh alat tangkap, juga dipengaruhi oleh keadaan *fishing ground* atau wilayah tangkap, ekosistem laut dan juga ketersediaan. Apabila *fishing ground* dalam keadaan baik maka hasil tangkap yang diperoleh nelayan juga tidak mengecewakan. Namun apabila keadaan *fishing ground* telah rusak, maka nelayan tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan dan akan memutuskan untuk mencari *fishing ground* yang baru untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Sebagian besar nelayan Kabupaten Lamongan sering melakukan penangkapan ikan di luar perairan Lamongan. Hal tersebut diakibatkan oleh keadaan *fishing ground* di sekitar Lamongan sudah rusak dan jumlah tangkapan yang sedikit sehingga nelayan melakukan pencarian ikan hingga ke perairan Madura.<sup>1</sup> Selain di luar wilayah dari perairan Lamongan, nelayan Paciran juga melakukan pencarian ikan hingga ke perairan tetangga seperti di wilayah perairan Gresik. Tujuannya adalah mendapat hasil tangkap yang lebih. Kondisi tersebut menimbulkan konflik di kalangan nelayan yang sering terjadi akibat perebutan wilayah tangkap ikan. Namun kasus yang timbul di kalangan nelayan biasanya tidak banyak dimuat di media. Terdapat konflik besar di kalangan nelayan Lamongan seperti bentrok antara nelayan Ujung Pangkah Gresik dengan nelayan Weru Lamongan yang dipicu oleh nelayan Lamongan memasuki wilayah tangkap Kabupaten Gresik.<sup>2</sup>

Konflik yang terjadi antara nelayan Lamongan dan Gresik antara tahun 1999-2004 kerap kali terjadi dan konflik tersebut dipicu oleh beberapa

faktor mulai dari alat tangkap, wilayah tangkap, hingga kecemburuan sosial antar nelayan. Konflik yang kerap kali antar nelayan kabupaten Lamongan dan Gresik diselesaikan oleh nelayan yang terlibat dan juga didukung oleh kelompok nelayan. Penyelesaian konflik biasanya dilakukan dengan sistem kekeluargaan dan tanpa melibatkan pihak pemerintah. Namun apabila konflik dirasa tidak dapat ditangani oleh kelompok nelayan, maka pihak pemerintah antar wilayah akan menanggapi melalui polisi air. Pada penelitian ini berusaha mengungkap konflik antar nelayan Kabupaten Lamongan dan Gresik pada tahun 1999-2004 yang disebabkan oleh perebutan *fishing ground* atau wilayah tangkap dan juga mengungkapkan bagaimana pembatasan wilayah tangkap nelayan antar kabupaten berdasarkan konstruk nelayan itu sendiri.

Rumusan masalah pada penelitian ini yakni 1. Bagaimana kondisi *fishing ground* antara nelayan Kabupaten Lamongan dengan Gresik. 2. Bagaimana proses penyelesaian Konflik perebutan *fishing ground* antara nelayan Kabupaten Lamongan dengan Gresik tahun 1999-2004. Tujuan penelitian ini yakni 1. Untuk menjelaskan kondisi *fishing ground* antara Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Gresik tahun 1999-2004. 2. Untuk mendeskripsikan proses penyelesaian Konflik perebutan *fishing ground* antara nelayan Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Gresik tahun 1999-2004.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan berbagai pustaka guna mengetahui seberapa jauh taju yang diteliti pernah diteliti sebelumnya. Terdapat beberapa pustaka yang digunakan peneliti yang dijadikan pendukung dalam penelitian diantaranya yakni:

Buku yang berjudul *konflik sosial nelayan kemiskinan dan perebutan sumber daya alam* yang ditulis Kusnadi. Buku tersebut berisi mengenai berbagai konflik nelayan di Indonesia dan juga berisi penyelesaian serta jejak pendapat mengenai konflik sosial nelayan. Buku ini juga berisi mengenai berbagai hal terkait nelayan dan salah satunya membahas konflik yang terjadi di Lamongan dan Gresik.

Disertasi Universitas Gadjad Mada tahun 2010 yang berjudul *konflik pemanfaatan sumber daya perikanan laut di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur periode 1993-2005* yang berisi mengenai konflik yang dialami oleh nelayan Lamongan dan Gresik akibat perbedaan alat tangkap. Didalam skripsi ini berisi berbagai permasalahan antar nelayan yang dipicu perbedaan alat tangkap.

Jurnal psikosains vol. 4/no. 2/februari 2012 yang berjudul model pengembangan resolusi konflik nelayan pantai Utara Jawa Timur yang ditulis oleh Isa Wahyudi, Achmad Irman Muzni, dan Suryanto dari Universitas Muhammadiyah Gresik yang mengenai berbagai konflik nelayan yang terjadi di

<sup>1</sup>Surabaya post, 3 mei 1998 hal 1 dalam buku *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan Dan Perebutan Sumber Daya Alam*, Drs. Kusnadi, M.A., (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2002), hlm. 119.

<sup>2</sup>Kompas, 12 April 2003 Dalam Jurnal Psikosains, Vol. II/Th. II/Februari 2008 Karya Ach.

sepanjang pantai utara Jawa timur yang meliputi 5 wilayah termasuk Kabupaten Lamongan dan Gresik.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian sejarah yang sesuai dengan konteks dan kajian penelitian yang merupakan penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya.<sup>3</sup> Dalam metode penelitian sejarah, terdapat suatu metode yang dinamakan metode sejarah dimana di dalam metode sejarah ini menjadi suatu bantuan untuk mencari sumber dalam penulisan kritis penelitian sejarah secara tertulis.

Penelitian diawali dengan tahap heuristik yaitu proses mencari dan mengumpulkan sumber atau data. Proses heuristik atau pengumpulan data dilakukan dengan dokumen, pustaka, observasi (pengamatan tidak langsung/non partisipan), dan wawancara.<sup>4</sup> Pengumpulan data atau tahap heuristik dalam penelitian konflik nelayan Paciran tahun 1999-2004 di peroleh dari data atau sumber primer dan juga sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber primer yakni sumber yang diciptakan pada waktu yang sejaman dengan terjadinya suatu peristiwa dan juga bisa berupa kesaksian orang terhadap suatu peristiwa tersebut dan orang yang memberikan kesaksian mengetahui bagaimana suatu peristiwa itu berlangsung atau menjadi pelaku atau terlibat dalam peristiwa tersebut. Sedangkan sumber sekunder merupakan suatu sumber yang diperoleh jauh dari waktu peristiwa tersebut terjadi dan membahas mengenai peristiwa tersebut dan digunakan sebagai sumber pendukung dan pelengkap dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan yakni koran Kompas 12 April 2003 yang membahas mengenai pembakaran kapal nelayan Lamongan oleh nelayan Gresik yang disebabkan oleh nelayan Lamongan memasuki wilayah tangkap nelayan Gresik, tabloid oposisi yang ditulis oleh Alham M. Ubey pada 1 September 1999 dengan judul "rusuh Paciran, Gara-gara Faried" yang memuat berita mengenai kerusakan yang dilakukan oleh nelayan Paciran dan menghancurkan berbagai fasilitas pemerintahan dan juga pariwisata. Peristiwa tersebut terjadi sebagai rangkaian konflik nelayan Paciran dan nelayan Gresik yang sudah berlangsung sejak tahun 1993. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber primer berupa wawancara dengan narasumber pelaku atau yang terlibat wawancara akan dilakukan dengan para

nelayan di desa terkait di Paciran dan Gresik. Sedangkan sumber sekunder yang akan digunakan yakni buku yang berjudul konflik sosial nelayan kemiskinan dan perebutan sumber daya alam yang ditulis oleh Drs. Kusnadi, M.A. dimana buku tersebut juga memuat beberapa konflik nelayan yang pernah terjadi di Indonesia dan nelayan Paciran salah satunya. Selain buku tersebut, juga menggunakan sumber primer berupa koran yakni koran Jawa Pos terbitan 31 Oktober 2001 tentang faktor penyebab konflik. Sumber primer yang digunakan menjadi bahan pendukung dalam penelitian skripsi.

Tahap kedua yakni melakukan kritik sumber, kritik (pengujian) terhadap sumber terdiri dari kritik ektern (pengujian terhadap otentikitas, asli, turunan, palsu, serta relevan tidaknya suatu sumber. Kritik intern yaitu pengujian terhadap isi atau kandungan sumber. Tujuan kritik untuk menyeleksi data menjadi fakta.<sup>5</sup> untuk menjadi sfakta yang siap untuk dirangkai menjadi kisah sejarah perlu adanya kritik sumber.<sup>6</sup> Pada sumber yang telah disebutkan diatas, penulis melakukan kritik intern terhadap tabloid oposisi dan juga hasil wawancara apakah sumber-sumber tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan apakah kesaksian yang diberikan oleh sumber tersebut memang dapat dipercaya. Dan juga melakukan kritik ektern dengan melihat kerelevanan sumber, keaslian sumber, dan juga keutuhan sumber dalam penelitian. Melalui kritik sumber diharapkan akan mendapatkan fakta yang siap untuk direkonstruksi sedemikian rupa menjadi kisah sejarah.<sup>7</sup>

Tahap ketiga yakni interpretasi atau penafsiran terhadap fakta berdasar pada sumber. Pada tahap interpretasi ini, penulis melakukan penafsiran terhadap sumber yang telah melalui tahap kritik sumber. Pada tahap ini penulis akan memecari korelasi atau hubungan antar sumber satu dengan sumber yang lain untuk ditafsirkan dan menjadi sebuah fakta sejarah. Fakta-fakta itu kemudian kita susun secara kronologis, sehingga merupakan suatu kerangka kisah sejarah.<sup>8</sup> Tahap interpretasi atau penafsiran dilakukan setelah sumber telah dibaca dan dianalisis berdasar pada pokok pembahasan penelitian.

Tahap yang terakhir yakni tahap historiografi atau tahap penulisan sejarah. Pada tahap ini, peneliti menyusun hubungan antar fakta yang ditemukan kedalam suatu teks eksplanasi sejarah. Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode sejarah yang baik.

<sup>3</sup>Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian; Pengenalan Dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*, (Jogjakarta: Deepublish), hlm. 71.

<sup>4</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 126.

<sup>5</sup>Aminudiin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005), Hlm. 10.

<sup>6</sup>Sadirman AM, *Mengenal Sejarah*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2004), Hlm. 102.

<sup>7</sup>*Ibid* Hlm. 104-105.

<sup>8</sup>*Ibid* Hlm. 105.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Kabupaten Lamongan dan Gresik

#### 1. Kondisi Geografis

Propinsi Jawa Timur terletak pada 111,0' hingga 114,4' bujur timur dan 7,12' hingga 8,48' lintang selatan. Luas wilayah Propinsi Jawa Timur yakni 46.428,57 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 37 kabupaten/kota, 29 kabupaten, dan 8 kota.<sup>9</sup> Propinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga dataran yakni dataran tinggi, dataran sedang, dan dataran rendah. Dataran tinggi merupakan wilayah dengan ketinggian rata-rata diatas 100 meter diatas permukaan laut, dataran sedang merupakan dataran yang memiliki ketinggian antara 45-100 meter diatas permukaan laut, dan wilayah dengan dataran rendah yakni wilayah yang memiliki ketinggian dibawah 45 meter diatas permukaan laut.<sup>10</sup>

Kabupaten Lamongan secara geografis terletak antara 6° 51' 54'' sampai 7°23'6'' lintang selatan, dan antara 122° 4'41'' sampai 122° 33'12'' bujur timur.<sup>11</sup> Kabupaten Lamongan memiliki luas 1.669,55 Km<sup>2</sup> atau setara dengan 166.955 Ha yang terdiri dari 86.348 Ha tanah sawah, 13.051 Ha pekarangan atau halaman sekitar, 28.222 Ha tegal atau kebun, 29.931 Ha hutan negara, dan 9.403 Ha lainnya. Wilayah pemerintahan Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 kecamatan dan 474 desa atau kelurahan.<sup>12</sup> Dari 27 kecamatan di Lamongan, terdapat 2 kecamatan yang terletak di pesisir Pantai Utara Jawa Timur yakni Kecamatan Paciran dan Brondong. Secara administratif kewilayahan, Kecamatan Paciran terdiri dari 16 desa dan 1 kelurahan. Untuk jumlah desa di Kecamatan Brondong sebanyak 9 desa dan 1 kelurahan.<sup>13</sup> Dari total 25 desa di dua kecamatan tersebut, yang termasuk desa pesisir berjumlah 17 desa. Desa Weru merupakan salah satu desa yang hampir semua masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, *Jawa Timur Dalam Angka 2000*, (Surabaya:Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2001), Hlm. 3.

<sup>10</sup>Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, *Jawa Timur Dalam Angka 2001*, (Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2002), Hlm. 4.

<sup>11</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Dan Bappeda Kab. Lamongan, *Lamongan Dalam Angka 2003*, (Lamongan: Badan Pusat Statistik Dan Bappeda Lab. Lamongan, 2004), Hlm.3.

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik, *Lamongan Dalam Angka 2003*, (Lamongan: Badan Pusat Statistik, 2004), Hlm. 23

<sup>13</sup>Tim Penulis, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan*, (Lamongan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Dan Bappeda Kabupaten Lamongan, 2004), Hlm. 62.

**Gambar 3.1**  
**Peta Kabupaten Lamongan**



Sumber : Lamongan Dalam Angka 2003

Wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112 sampai 113 bujur timur dan antara 7 sampai 8 lintang selatan. Wilayah Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut dari ibukota Propinsi Jawa Timur yakni Surabaya. Kabupaten Gresik memiliki luas 1.191,25 kilometer persegi dan wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan laut kecuali satu kecamatan yakni Kecamatan Panceng yang memiliki ketinggian 25 meter diatas permukaan laut.<sup>14</sup> Kabupaten Gresik berbatasan dengan berbagai daerah disebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, disebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto serta Kota Surabaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.<sup>15</sup> Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Kabupaten Gresik sebagian besar wilayahnya terletak di pesisir pantai dan memiliki pulau bawean. Daerah di Kabupaten Gresik yang terletak di wilayah pesisir yakni Kecamatan Kaebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Tambak.<sup>16</sup>

**Gambar 3.2**  
**Peta Kabupaten Gresik**



Sumber: Gresik dalam Angka 2003

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, *Gresik Dalam Angka 2003*, (Badan Pusat Statistik: Gresik, 2004), Hlm.3

<sup>15</sup>Ibid., Hlm. 4.

<sup>16</sup>Ibid., Hlm. 3.

**2. Kekuatan Nelayan**

Antara nelayan kabupaten Lamongan dan Gresik memiliki kekuatan laut yang berbeda mulai dari jumlah armada kapal, jumlah alat tangkap, jumlah nelayan, hingga jenis nelayan. Setiap kabupaten memiliki keunggulan dalam maritim tersendiri. Seperti halnya dengan jumlah nelayan dan petani ikan yang memiliki perbedaan diakibatkan oleh letak geografis wilayahnya dan juga potensi yang dimiliki setiap daerah. Dari profesi nelayan dengan petani ikan antar kabupaten memiliki jumlah yang berbeda dan hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Nelayan dan Petani Ikan Menurut Kabupaten/Kota Dan Sub Sektor Perikanan**

Jenis	Kabupaten/kota							
	Gresik		Lamongan		Gresik		Lamongan	
	1999		2000		2001		2001	
Perikanan laut	9.127	15.993	9.073	15.993	7.895	15.993		
Andon					463	2.465		
Perikanan umum	197	7.740	185	7.740	180	7.740		
Tambak	12.470	776	13.256	776	13.256	776		
Sawah tambak	6.775	38.768	6.779	38.769	6.779	38.769		
kolam	166	6.680	135	6.680	135	6.680		
Mina padi	0	1.630	0	1.630	0	1.630		
Keramba	99	0	146	0	0	0		
Jumlah	28.924	71.587	30.179	74.053	28.708	74.053		

Jenis	Gresik		Lamongan		Gresik		Lamongan	
	2002		2003		2003		2003	
	Perikanan laut	0	19.491	10.725	19.483			
Andon	0	3.439	345	3.439				
Perikanan umum	444	7.740	444	7.740				
Tambak	23.192	2.719	16.861	2.714				
Sawah tambak	6.780	22.831	6.783	22.831				
kolam	136	7.257	136	7.257				
Mina padi	0	0	0	0				
Keramba	0	0	0	0				
Jumlah	30.552	63.477	35.294	63.464				

Sumber: Jawa Timur dalam angka 2000,2001,2002

Tabel diatas merupakan data hasil olahan peneliti yang diambil dari buku *Jawa Timur Dalam Angka* pada tahun 2000, 2001 hingga tahun 2002. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah nelayan perikanan laut Kabupaten Lamongan memiliki jumlah yang lebih besar dibanding jumlah nelayan perikanan laut Kabupaten Gresik. Sedangkan untuk jumlah petani ikan tambak pada Kabupaten Gresik memiliki jumlah yang lebih besar dibanding jumlah petani ikan tambak di Kabupaten Lamongan dan jumlah tersebut terus bertahan dari tahun ke tahun dengan keunggulan pada setiap kabupaten. Selain itu, dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa nelayan laut di Kabupaten Lamongan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan nelayan tambak di Kabupaten Lamongan dan nelayan tambak di Kabupaten Gresik memiliki jumlah yang lebih besar dibanding nelayan laut di Kabupaten Gresik. Setiap kabupaten memiliki keunggulan nelayan

tersendiri dan tentunya hal tersebut juga berkaitan dengan jumlah alat tangkap nelayan laut dan lusanya tambak pada setiap kabupaten.

Selain itu, kekuatan nelayan di Kabupaten Lamongan dan Gresik dapat kita lihat dari jumlah alat tangkap yang dimiliki nelayan pada setiap kabupaten/kota. Jumlah alat tangkap nelayan pada kabupaten lamongan dan gresik pada tahun 2000 sampai tahun 2003 dapat kita lihat dari data dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Alat Penangkap Ikan Laut Menurut Kabupaten/Kota**

Alat tangkap	Kabupaten			
	Gresik		Lamongan	
	2000		2001	
Payang	318	1.486	750	1.486
Dogol	0	163	0	160
Pukat pantai	0	0	0	0
Pukat cincin	155	374	16	374
Jaring insang hanyut	873	583	658	583
Jaring kilik	0	0	602	0
Jaring insang tetap	1043	324	352	324
Bagan prau	0	0	0	0
Bagan tancap kelung	0	0	0	0
Serok	0	0	0	0
Jaring pukat angkat lainnya	0	0	0	0
Tramel net	0	0	120	0
Jaring lingkaran	0	0	215	0
Rawai tetap	0	0	0	0
Rawai hanyut	0	0	0	0
Pancing yang lain	941	63	903	60
Pancing tanda sero	0	0	550	0
Bubu	0	0	0	0
Perangkap lainnya	498	513	390	513

Alat tangkap	Gresik		Lamongan		Gresik		Lamongan	
	2002		2003		2003		2003	
	Payang	495	568	768	560			
Dogol	0	3.569	0	3.569				
Pukat pantai	0	0	0	0				
Pukat cincin	80	271	28	271				
Jaring insang hanyut	685	210	679	295				
Jaring kilik	7.280	0	618	0				
Jaring insang tetap	200	500	364	500				
Bagan prau	0	0	0	0				
Bagan tancap kelung	282	0	127	0				
Serok	50	0	0	0				
Jaring pukat angkat lainnya	0	0	398	0				
Tramel net	60	595	132	595				
Jaring lingkaran	0	0	231	0				
Rawai tetap	0	0	0	0				
Rawai hanyut	0	0	0	0				
Pancing yang lain	1.649	2.360	953	2.360				
Pancing tanda sero	0	0	431	0				
Bubu	0	0	0	0				
Perangkap lainnya	0	0	0	0				

Sumber: Jawa Timur dalam angka 2000,2001,2002

**Tabel 3.3**  
**Alat Penangkap Ikan Di Perairan Umum**  
**Menurut Kabupaten atau Kota**

Alat tangkap	Kabupaten/kota			
	Gresik	Lamongan	Gresik	Lamongan
	2000		2001	
Jaring ingsang	105	1.033	143	1.033
Jaring angkat	0	0	0	0
Pancing hook	0	1.119	0	1.119
Tangkap	0	432	0	432
Lain-lain	95	394	0	394
Jumlah total	200	2.978	143	2.978

Alat tangkap	Kabupaten/kota			
	Gresik	Lamongan	Gresik	Lamongan
	2002		2003	
Jaring ingsang	106	913	109	913
Jaring angkat	97	390	98	390
Pancing hook	0	869	0	869
Tangkap	0	432	0	432
Lain-lain	0	394	0	394
Jumlah total	203	2.998	297	2.998

Sumber: Jawa Timur dalam Angka 2000,2001,2002

Dua gambar diatas merupakan hasil tabel olahan penulis yang memuat mengenai jumlah alat tangkap nelayan di laut dan alat tangkap di perairan umum pada tahun 1999 sampai 2003. Tabel diperoleh dari buku Jawa Timur Dalam Angka yang telah diolah oleh peneliti dan menggabungkannya menjadi satu tabel. Dari gambar tabel data diatas, kita dapat melihat perbandingan jumlah alat tangkap antar kabupaten pada setiap jenis alat tangkapnya. Dari kedua tabel diatas kita juga dapat melihat bahwa jumlah alat tangkap yang digunakan nelayan pesisir sangat beragam jenisnya mulai dari payang, dogol, pukot, berbagai jenis jaring, bagan, serok, bubu, pancing, hingga alat tangkap ikan lainnya yang digunakan oleh para nelayan di Kabupaten Lamongan dan Gresik. Dari tabel diatas dapat kita lihat banyaknya jumlah alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan di Kabupaten Lamongan dan Gresik. Tentunya jumlah alat tangkap tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut.

### B. Konstruksi Fishing Ground Nelayan Kabupaten Lamongan dan Gresik

Wilayah tangkap nelayan tidak terdapat pembatasan yang jelas secara tertulis berupa peraturan. Peraturan pemerintah hanya mengatur mengenai wilayah pesisir atau wilayah laut yang diolah oleh pemerintah daerah tingkat II atau setara dengan kabupaten yakni wilayah 0 sampai 4 mil dari bibir pantai di daerah tingkat II termasuk di wilayah Kabupaten Lamongan dan Gresik. Menurut bapak Joko, Jalur penangkapan ikan berdasarkan pada surat ijin kapal dimana jalur penangkapan ikan dibagi menjadi jalur1, jalur2, dan jalur 3. Pada setiap jalur terdapat ketentuan kekuatan kapal

yang boleh memasuki jalur1 dan seterusnya. Namun setelah terbitnya peraturan WPP NRI atau Wilayah Pembagian Pengelolaan Negara Republik Indonesia, maka penguasaan jalur penangkapan ikan tidak lagi berlaku dan hanya berlaku secara hukum adat.<sup>17</sup>

Untuk pembatasan wilayah tangkap antar nelayan kabupaten hanya diatur dan dibatasi dengan kearifan lokal setiap daerah tanpa tertulis di suatu peraturan resmi. Pada kenyataannya, nelayan melakukan penangkapan ikan hingga ke berbagai wilayah untuk mencari ikan di lautan dan dengan menggunakan berbagai alat tangkap. Para nelayan melakukan penangkapan ikan hingga ke berbagai wilayah tergantung pada tempat ikan berkumpul atau letak dimana nelayan menemukan ikan. Hal tersebut juga berlaku pada nelayan Weru Lamongan. Masyarakat nelayan Weru Lamongan membatasi wilayah tangkap dengan kabupaten Gresik yakni dengan hukum adat, batasnya yakni tempat pengeboran yang berada di wilayah Ujungpangkah Gresik dengan alasan banyak kegiatan nelayan lokal disekitar tempat pengeboran tersebut.<sup>18</sup> Menurut nelayan Ujungpangkah Gresik, wilayah penangkapan ikan dilaut sangatlah bebas dan tidak terdapat aturan secara tertulis dan hanya berlaku aturan pergantian jam penangkapan di laut yang sama. Hal tersebut bermula dari kebiasaan antar nelayan dan dijadikan suatu peraturan adat dengan dilandasi kesadaran antar nelayan karena wilayah laut merupakan wilayah yang bebas menurut para nelayan laut.<sup>19</sup>

Nelayan Weru mengakui bahwa sekitar tahun 1999-2004 rawan terjadi konflik dengan nelayan ujungpangkah Gresik. Dimana konflik yang terjadi dipicu oleh beberapa faktor dan salahsatunya yakni akibat wilayah tangkap nelayan serta kesenjangan penggunaan alat tangkap ikan. Konflik antara nelayan Kabupaten Lamongan dan Gresik merupakan konflik kelas. Konflik kelas merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan kelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan (fishing ground) yang digambarkan dengan kesenjangan teknologi penangkapan ikan.<sup>20</sup> Selain merupakan konflik kelas, konflik yang terjadi antara nelayan Kabupaten Lamongan dengan Gresik merupakan konflik cara produksi atau alat tangkap. Konflik cara produksi atau alat tangkap merupakan konflik yang terjadi akibat alat tangkap baik antar nelayan dengan alat tangkap tradisional, maupun nelayan dengan alat tangkap dan nelayan dengan alat tangkap modern.<sup>21</sup> Konflik terjadi pada

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak joko

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan ketua rukun nelayan desa Weru Lamongan bapak Khusnul Manan pada 8 maret 2020.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan ketua rukun nelayan Pangkah kulon Gresik bapak Abdul Latif, SPd.i pada 27 juni 2020

<sup>20</sup> Pengembangan resolusi konflik nelayan pantai utara jawa timur, jurnal psikososial, hlm 67

<sup>21</sup> Ibid.

situasi saat sumber daya langka, dan didukung dengan hubungan sesama yang buruk antara nelayan Weru Kabupaten Lamongan dengan nelayan UjungPanglah Gresik.

### C. Penyelesaian konflik

Proses penyelesaian konflik antar nelayan Kabupaten Lamongan dengan nelayan Kabupaten Gresik ditangani dengan berbagai cara sesuai dengan besar konflik yang terjadi, serta peristiwa yang meliputi konflik tersebut. Apabila konflik nelayan yang terjadi hingga menimbulkan bentrok antar kelompok nelayan, maka yang menyelesaikan konflik tersebut yakni satuan polisi air dari Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik selaku badan pemerintah dalam bidang perairan laut. namun apabila konflik yang terjadi antar nelayan masih bersekala kecil dan melibatkan sedikit orang, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan masing masing kelompok nelayan yang terkait. Setelah konflik terjadi, peran pemerintah yakni melakukan pengawasan terhadap nelayan yang telah terlibat konflik guna pengendalian dan meminimalisir konflik yang akan terjadi selanjutnya.

Didalam konflik yang terjadi, peran pemerintah yakni melakukan penanganan apabila konflik yang terjadi berupa kontak fisik seperti bentrok antar nelayan dilaut hingga penyerangan–penyerangan, selain itu, pasca konflik pemerintah melakukan pengawasan lebih intens terhadap kegiatan nelayan yang terlibat konflik dan melakukan pertemuan dengan nelayan yang terlibat untuk bermusyawarah dan menyelesaikan konflik. Dalam penanganan konflik dan upaya pencegahan konflik mendatang antara nelayan Kabupaten Lamongan dan Gresik dilakukan berbagai hal, diantaranya yakni penyuluhan nelayan, koordinasi antar wilayah, pemberdayaan nelayan, pengembangan usaha kooperatif, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>22</sup>

**Gambar 3.3**  
kegiatan penyuluhan



Sumber: dokumen pribadi

Gambar diatas merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Air Udara Kabupaten Lamongan sebagai upaya pencegahan

terjadinya konflik melalui penyuluhan dengan masyarakat nelayan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan sudah menjadi agenda rutin dan dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Lamongan.

Konflik yang terjadi antara nelayan Kabupaten Lamongan dan Gresik menimbulkan dampak dalam berbagai aspek, diantaranya yakni ekonomi, sosial, hingga politik. Dampak ekonomi yang langsung dirasakan yakni pendapatan nelayan bubu yang berkurang akibat nelayan trawl memasuki wilayah tangkap nelayan bubu dengan alat tangkap yang lebih besar, punahnya ikan di wilayah tangkap nelayan bubu Gresik akibat penggunaan alat tangkap nelayan trawl, hingga kerugian materiil apabila bubu nelayan Gresik mengalami kerusakan atau tersangkut alat tangkap trawl. Dari segi sosial berdampak pada prasangka buruk terhadap nelayan yang pendatang atau yang berasal dari wilayah luar. Dari segi politik berdampak pada hubungan bilateral antar kabupaten akibat terjadinya suatu konflik nelayan

## PENUTUP

### A. Simpulan

Konflik antar nelayan Lamongan dan Gresik yang terjadi disebabkan oleh dua faktor yakni wilayah tangkap dan juga alat tangkap. Wilayah tangkap nelayan tidak memiliki batasan yang jelas dan tertulis secara hukum namun wilayah tangkap nelayan diatur dengan alat tangkap yang digunakan berdasarkan besarnya kapasitas kapal nelayan. Pegaturan wilayah tangkap berdasarkan kapasitas kapal dituangkan dalam WPPNRI yang membagi wilayah penangkapan berdasarkan besarnya mesin kapal dan alat tangkap. Wilayah tangkap menurut nelayan hanya diatur secara hukum adat dan tidak tertulis pasti didalam suatu perjanjian. Pembatasan wilayah tangkap yang dilakukan oleh nelayan menggunakan pembatasan secara hukum adat berdasarkan kearifan lokal setempat. Seperti pembatasan wilayah oleh nelayan Weru Kabupaten Lamongan dengan Nelayan Ujungpangkah Gresik yakni pengeboran minyak yang berada di ujungpangkah.

Menurut para nelayan laut, laut merupakan suster wilayah yang besar dan milik tuhan sehingga para nelayan ketika mencari ikan juga menganggap memiliki kebebasan menangkap ikan dimana saja di laut. Pengaturan wilayah penangkapan dilaut hanya berdasar pada kearifan lokal yang tercipta akibat kebiasaan nelayan setempat. Pengaturan berdasarkan kearifan lokal tersebut dapat berjalan apabila antar individu saling menghormati dan memahami peraturan dan kebiasaan yang berlaku. Namun seringkali antar individu juga tidak mengindahkan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya suatu konflik antar nelayan.

Konflik antara nelayan Weru Lamongan dan Ujungpangkah Gresik seringkali terjadi karena

<sup>22</sup>Ibid.,

kelalaian antar individu yang tidak menaati peraturan lokal yang berlaku. Karena antar nelayan sering melakukan pencarian ikan ke wilayah lain, nelayan tersebut juga harus mematuhi kebiasaan serta peraturan yang berlaku di wilayah tangkap tersebut. Apabila antar nelayan mencari ikan di wilayah tangkap wilayah lain maka yang harus dilakukan yakni mengikuti hukum adat yang berlaku di wilayah setempat untuk menghindari adanya konflik.

Sejauh ini konflik antara nelayan Weru Lamongan dengan nelayan Ujungpangkah Gresik diselesaikan secara kekeluargaan antar nelayan . namun terkadang HSNI atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia setempat juga berperan dalam penghubung antar nelayan yang terlibat konflik. Aparat pemerintah hanya akan ikut menngani pada konflik besar yang menimbulkan massa ataupun korban.

Dampak dari konflik nelayan yang terjadi yakni pendapatan nelayan ujungpangkah yang berkurang karena penggunaan alat tangkap aktif milik nelayan Weru, punahnya beberapa jenis ikan tangkapan nelayan Ujungpangkah, prasangka buruk terhadap nelayan yang tidak dikenal atau asing, hingga hubungan bilateral antar kabupaten.

#### DAFTAR PUSTAKA

Surabaya post, 3 mei 1998 hal 1 dalam buku *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan Dan Perebutan Sumber Daya Alam*, Drs. Kusnadi, M.A., (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2002).

Kompas, 12 April 2003 Dalam Jurnal Psikosains, Vol. II/Th. II/Februari 2008 Karya Ach. Irfan Muzni, Idha Rahayuningsih, Isa Wahyudi Universitas Muhammadiyah Gresik.

Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian; Pengenalan Dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*, (Jogjakarta: Deepublish).

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981).

Aminudiin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005).

Sadirman AM, *Mengenal Sejarah*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2004).

Badan Pusat Sttistik Propinsi Jawa Timur, *Jawa Timur Dalam Angka 2000*, (Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2001).

Badan Pusat Sttistik Propinsi Jawa Timur, *Jawa Timur Dalam Angka 2001*, (Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2002).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Dan Bapedda Kab, Lamongan, *Lamongan Dalam Angka 2003*, (Lamongan: Badan Pusat Sttistik Dan Bapedda Lab. Lamongan, 2004).

Tim Penulis, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan*, (Lamongan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Dan Bapedda Kabupaten Lamongan, 2004).

Badan Pusat Statistik, *Gresik Dalam Angka 2003*, (Badan Pusat Sttistik: Gresik, 2004).

Pengembangan resolusi konflik nelayan pantai utara jawa timur, jurnal psikosains, hlm 67

Hasil wawancara dengan Bapak Joko.

Hasil wawancara dengan ketua rukun nelayan desa Weru Lamongan bapak Khusnul Manan pada 8 maret 2020.

Hasil wawancara dengan ketua rukun nelayan Pangkah kulon Gresik bapak Abdul Latif, SPd.i pada 27 juni 20.